

ABSTRAK

Sistem bisnis *franchise* (waralaba) telah menjadi salah satu perhatian bagi masyarakat dan memberi terobosan dalam dinamika perekonomian dan mengakibatkan pesatnya perkembangan bisnis di Indonesia. *Takoyaki 48* di Semarang adalah salah satu bisnis yang berkembang dari usaha kecil, pengembangan ke depan *Takoyaki 48* menawarkan program kemitraan dengan pola *franchise* berupa pengembangan outlet dengan mitra yang membeli hak intelektual dengan membayar *fee franchise* untuk jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pengaturan pelaksanaan perjanjian *franchise* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, untuk mengetahui perlindungan hukum dan pelaksanaan perjanjian *franchise* bagi para pihak di *Takoyaki 48*, serta untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian *franchise* pada *Takoyaki 48*.

Penelitian ini dilaksanakan di Outlet *Takoyaki 48* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis *franchise* (waralaba) merupakan bisnis yang dibangun atas dasar sebuah perjanjian yang berkembang dari perjanjian yang ada di dalam masyarakat yang belum diatur dalam pedoman hukum perdata yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjiannya disebut dengan perjanjian *innominaat* (perjanjian tak bernama). Pada dasarnya perjanjian menimbulkan akibat hukum, para pihak diharuskan untuk mengetahui isi dari perjanjian tersebut, dengan diketahui isinya maka para pihak mengetahui kewajiban dan haknya sehingga keduanya tidak merasa dirugikan. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise* di *Takoyaki 48* sangat kurang karena dari isi perjanjiannya sudah mengalami kecacatan karena tidak detailnya isi perjanjian tersebut, dimana faktor yang mempengaruhinya adalah ketatnya peraturan pemerintah yang berfungsi mengawasi jalannya waralaba di Indonesia namun kenyataannya membuat bisnis usaha mikro dan kecil lama untuk berkembang menjadi bisnis menengah atau besaryang akan menggunakan sistem *franchise*.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian *Franchise*, Hak Kekayaan Intelektual, *Takoyaki 48*.

ABSTRACT

The franchise business system has become one of the concerns for the community and provided a breakthrough in the dynamics of the economy and resulted in the rapid development of business in Indonesia. Takoyaki 48 in Semarang is one of the growing businesses of small businesses, the future development of Takoyaki 48 offers a franchise pattern partnership program in the form of developing outlets with partners who buy intellectual rights by paying a franchise fee for a certain period of time. This study aims to determine the legal protection and implementation arrangements of franchise agreements based on Government Regulation Number 42 of 2007, to find out the legal protection and implementation of franchise agreements for parties in Takoyaki 48, and to find out how to resolve disputes made by the parties in the franchise agreement Takoyaki 48.

This research was conducted at 48 Takoyaki Outlets using an empirical juridical approach. The type of research used is descriptive research. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials where data collection is done by means of literature studies, document studies and field studies. Data processing is done in a qualitative way.

The results of the study show that the franchise business is a business that is built on the basis of an agreement that develops from an agreement that is in the community that has not been regulated in civil law guidelines, namely the Civil Code, the agreement is called the agreement innominaat (nameless agreement) Basically the agreement creates legal consequences, the parties are required to know the contents of the agreement, with the contents known, the parties know their obligations and rights so that they do not feel disadvantaged. Legal protection for the parties in the franchise agreement in Takoyaki 48 is very lacking because of the contents of the agreement has experienced disability because of the lack of detail in the agreement, where the factors that influence it are strict government regulations that oversee the running of franchises in Indonesia but in fact make micro and small businesses long to develop into a medium or large business that will use the franchise system.

Keywords: Legal Protection, Franchise Agreement, Intellectual Property Rights, Takoyaki 48.